

Atas Opini WTP,

Pemkab Badung Raih Penghargaan Kemenkeu

MANGUPURA, NusaBali

Atas komitmen dan keberhasilan Kabupaten Badung melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan senantiasa berpedoman kepada prinsip tata kelola keuangan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel atas LKPD Tahun 2014 selain meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali, apresiasi serupa diberikan oleh Kementerian Keuangan RI.

Apresiasi tersebut ditunjukkan dengan pemberian penghargaan kepada Pemkab Badung yang diterima Penjabat Bupati Badung Ir I Nyoman Harry Yudha Saka MM dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan



• IST
PENJABAT Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka (kanan) menerima penghargaan opini WTP dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI Jakarta, Jumat (2/10).

RI Jakarta, Jumat (2/10).

Acara tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat negara. Hadir juga Asisten Administrasi Umum Pemkab Badung I Gst Ngr Oka Darmawan, Kepala Inspektorat Luh Suryaniti, Kabag Keuangan I Ketut Gede Suyasa, dan Sekretaris Bappeda dan Litbang Agus Aryawan.

Pemerintah pusat beri penghargaan pada 207 entitas pelaporan 26 pemrov, 149 pemkab, 50 pemkot, yang berhasil menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan opini audit WTP.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro diterima Penjabat Bupati Badung Harry Yudha Saka. Menteri Bambang Brodjonegoro dalam sambutannya mengatakan; penghar-

gaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada kementerian dan lembaga setingkat serta pemerintah daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik. Khususnya yang mampu meraih opini WTP dari BPK.

Penjabat Bupati Badung Harry Yudha Saka mengungkapkan, bahwa penghargaan ini patut disyukuri dan merupakan hasil kerja keras seluruh SKPD Pemkab Badung dan menjadi sebuah kebanggaan bagi daerah dan Pemkab Badung yang merupakan penyemangat untuk tetap bekerja secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Dengan diperolehnya penghargaan WTP ini, wajib bagi Pemkab Badung untuk mempertahankan dan ini tentu menjadi komitmen Pemkab. Badung," tegasnya. @

Edisi : Senin, 5 Oktober 2015

Hal : 2



Berhasil Kelola Keuangan Daerah Kemenkeu Beri Penghargaan Pemkab Buleleng ✓



BUPATI Buleleng Putu Agus Suradnyana terima penghargaan dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

SINGARAJA, NusaBali

Keberhasilan Pemkab Buleleng kelola keuangan daerah dengan baik, kembali mendapat penghargaan. Kali ini, penghargaan itu datang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Penghargaan itu disampaikan dan diserahkan pada saat Rapat Nasional (Rakomas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2015 yang berlangsung pada Jumat (2/10) di Gedung Danapala, Kemenkeu.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Penyerahan penghargaan itu juga disaksikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, dan Ketua BPK RI Harry Azhar Asis serta seluruh pimpinan lembaga tinggi negara.

Dalam pengelolaan keuangan daerah tahun

2014, Buleleng berhasil menyabet penghargaan dari BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kini keberhasilan itu juga diakui oleh Kemenkeu.

Penghargaan serupa juga diterima oleh 62 Kementerian dan Lembaga Setingkat, 26 Pemprov, dan 50 Pemkot yang laporan keuangannya di tahun anggaran 2014 meraih WTP dari BPK.

Dalam sambutannya, Menteri Bambang Brodjonegoro mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada kementerian dan lembaga setingkat serta pemerintah daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik. Khususnya yang mampu meraih opini WTP dari BPK.

Terkait penghargaan tersebut, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan tersebut. "Penghargaan ini patut disyukuri. Sebuah kebanggaan dan keberhasilan bagi Buleleng karena menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam tata kelola keuangan daerah," ujarnya.

Bupati murah senyum ini juga menyebut, keberhasilan mendapat penghargaan dari Kemenkeu sekaligus tantangan bagi seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng untuk meningkatkan kinerjanya. Bahkan, pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2015, di target mencapai predikat WTP.

Keberhasilan meraih predikat WTP merupakan sejarah dan penantian yang panjang bagi Pemkab Buleleng. Keberhasilan ini diraih berkat kerja keras dan komitmen tinggi dari jajaran pemerintah SKPD yang mampu melakukan tata kelola keuangan dengan baik. @k19

Edisi : Senin, 5 Oktober 2015

Hal : 4



Pasar Mangkrak Rugikan Desa Puluhan Juta

Sejak operasional Pasar Desa Manggis mangkrak, kepala pasar mengundurkan diri dan seluruh pedagang yang mulanya jualan, serentak kabur.



● NUSABALI/NANTRA

PASAR Desa Manggis dioperasikan, guna menghindari temuan BPK, namun akhirnya tetap mangkrak.

AMLAPURA, NusaBali

Pasar Desa Manggis, Desa/Kecamatan Manggis, Karangasem yang mangkrak sejak tahun 2010, eksekunya desa mengalami kerugian terakumulasi Rp 50,4 juta. Sebab, lahan untuk pembangunan pasar seluas 1,5 hektare, rata-rata tiap bulan menghasilkan Rp 800.000, berasal dari penjualan buah kelapa. Setelah lahan jadi pasar, tidak lagi mendatangkan hasil, desa menanggung kerugian.

Sejak operasional Pasar Desa Manggis mangkrak, Kepala Pasar

Desa Manggis I Ketut Sundra, mengundurkan diri. Seluruh pedagang yang mulanya jualan, serentak kabur. Demikian kondisi terakhir Pasar Desa Manggis, hingga Minggu (4/10).

Pembangunan tahap I sejak Minggu (29 Agustus 2010) berbiaya Rp 559,5 juta, disusul pembangunan tahap II terbangun 22 Mei 2013 berbiaya Rp 1,85 juta. Maka sejak

Agustus 2010 lahan seluas 1,5 hektare milik Desa Manggis, diambil alih untuk membangun pasar. Sejak itu pula, seluruh pohon kelapa terpankas yang menghasilkan buah kelapa per bulan nilainya terjual Rp 800.000.

Sehingga hitung-hitungannya Agustus 2010 hingga Oktober 2015, tercatat 63 bulan Desa Manggis kehilangan penghasilan, sehingga

total Rp 50,4 juta.

Belum lagi sempat ada tagihan rekening listrik Rp 700.000 per bulan dan air Rp 150.000. Mengingat Pasar Manggis, tekor, maka I Ketut Sundra menolak bayar listrik dan air: "Makanya saya mengundurkan diri sebagai kepala pasar," kata I Ketut Sundra.

I Ketut Sundra mengatakan, mulanya sesuai rencana terbangun Pasar Seni Desa Manggis, kemudian diubah hendak bekerjasama dengan bank membangun kos ternyata batal, kemudian rencana kerjasama dengan KUD juga batal. Maka berubah jadi Pasar Desa Manggis.

"Makanya kami diminta, agar menyetujui Pasar Seni Desa Manggis, diubah jadi Pasar Desa Manggis, yang bertujuan agar pembangunan tersebut tidak jadi temuan BPK," katanya.

Sehingga katanya, terlaksana upacara mlaspas Pasar Desa Manggis, Kamis ((26 Desember 2013), dengan menghimpun 80 dagang. Sertelah jualan sekitar dua minggu,

akhirnya seluruh pedagang itu kembali cerai beraf.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan Karangasem I Gusti Nguurah Suarta mengakui kenyataan itu. Mulanya berupaya mendekati Kelian Desa Pakraman Manggis, dan segenap kelian banjar se-Desa Manggis, agar dagang bersedia jualan. Selanjutnya para pedagang minta jualan di areal bawah biar kondisinya datar juga telah diizinkan pemerintah, menyusul pementasan arena mainan anak-anak selama dua minggu sebagai pemikat pembeli agar datang.

"Ternyata tetap saja, tidak meman agar pasar tersebut beroperasi optimal," kata Gusti Suarta.

Adanya indikasi dioperasikannya Pasar Desa Manggis, yang sebelumnya sesuai perencanaan merupakan Pasar Seni Manggis, guna menghindari temuan BPK. "Itu memang benar adanya, agar tidak jadi temuan, karena awalnya usulannya untuk Pasar Seni, berubah jadi Pasar Desa Manggis," tambahnya. **k16**



Pembelian Sampah Plastik Dianggarkan Rp 230 Juta

★ Sebelumnya Rugi Rp 272 Juta karena Kebakaran

AMLAPURA, NusaBali

Permintaan warga masyarakat Karangasem agar sampah plastiknya terbeli semakin tinggi. Ini membuat Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Karangasem menyediakan anggaran di APBD Perubahan 2015, Rp 230 juta, untuk pembelian sampah plastik. Pembeliannya tetap Rp 2.000 per kilogram. Selanjutnya pemerintah menjual ke rekanan Rp 400 per kilogram, berarti masih menyubsidi Rp 1.600.

Sedangkan DKP juga mengalami kerugian Rp 272 juta, akibat terbakarnya TPA (tempat pemrosesan akhir) tempat penampungan sampah plastik seberat 136 ton di Banjar Besang, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Jumat (25/9) silam.

Hal ini dipaparkan Kepala DKP I Wayan Suama di Amlapura, Minggu (4/10). Anggaran pembelian sampah plastik di APBD Perubahan 2015 katanya, cukup besar. Sebab, permintaan dari sekolah-sekolah, masyarakat dan yang peduli sampah plastik terus meningkat.

"Nanti realisasinya menunggu dana di APBD Perubahan 2015, cair. Sekarang ini kan APBD itu masih dalam tahap verifikasi," jelas Suama. Suama mengakui kerugian Rp 272

juta akibat TPA terbakar, karena sampah itu terlambat terjual. Baru tahap negosiasi dengan rekanan, keburu terbakar. "Memang tidak secepat itu, bisa terjual. Sebab, sampah plastik tersebut masih perlu kami pilah-pilah. Karena sampah plastik berasal dari beragam jenis," katanya.

Sebelum terangkut ke TPA, terlebih

dahulu tertampung di 20 bank sampah tersebar di beberapa lokasi. Anggaran pembelian sampah plastik terus meningkat. Tercatat tahun 2014 sebesar Rp 250 juta, kali ini, meningkat di APBD 2015 Rp 250 juta, berlanjut tambahan di APBD Perubahan 2015 Rp 230 juta.

Di bagian lain Kasek SD Negeri 1 Ka-



KEBAKARAN di TPA Ababi yang merugikan dinas hingga Rp 272 juta.

rangasem I Wayan Tirtayasa berharap agar secepatnya sampah plastik yang telah menggunung di gudang terangkut. "Itu sampah plastik terkumpul sejak tiga bulan terakhir, agar segera terangkut. Kami tiap hari memilah sampah plastik dengan sampah organik," kata Tirtayasa.

Disinggung apakah pembelian sampah plastik sebelumnya telah terbayar, Tirtayasa mengakui ada yang belum terbayar. "Terpenting sampah yang kami kumpulkan terangkut, biar gudangnya kosong dari sampah," pintanya.

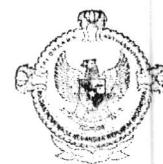
Sementara, Kasek SMAN 1 Am-

lapura Wayan Sugiana mengatakan, sampah plastik yang sebelumnya terkumpul, telah terangkut petugas. "Nanti setelah sampah plastik cukup tersedia, kembali kami kontak petugas agar terangkut. Kami sejak lama memilah sampah plastik dengan sampah organik memberdayakan semua siswa," jelas Sugiana.

SD Negeri 5 Karangasem melalui Kasek I Gusti Agung Putu Purna juga mengaku telah memilah sampah plastik, dan secara rutin terangkut. Sehingga siswa terbiasa hidup sehat di lingkungan yang rindang. "Di sekolah kan telah tersedia, dua bak sampah, untuk organik dan non organik," katanya. **k16**

Edisi : Senin, 5 Oktober 2015

Hal : 8



Raih WTP, Menkeu Berikan Penghargaan untuk Pemkab Jembrana



● NUSABALI/B DIWANGKARA

INSPEKTUR pada Inspektorat Jembrana, Ni Wayan Koriani mewakili Bupati Artha menerima penghargaan dari Menkeu RI, Bambang Brojonegoro, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Jumat (2/10).

NEGARA, NusaBali

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI Perwakilan Bali terhadap Pengelolaan Keuangan Pemkab Jembrana tahun 2014 berbuah manis. Pasalnya, dengan raihan WTP ini, Pemkab Tabanan dapat 'bonus' penghargaan dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan diserahkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Jumat (2/10).

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brojonegoro, menyerahkan peng-

hargaan kepada Bupati Jembrana, I Putu Artha, atas keberhasilannya menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2014 dengan capaian opini WTP tersebut. Penghargaan diserahkan langsung Menkeu didampingi Wakil Menteri Keuangan, Madiasmo, diterima Inspektur pada Inspektorat Jembrana, Ni Wayan Koriani. Menurut Menkeu, Bambang Brojonegoro, upaya untuk meningkatkan komitmen bagi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam mensinergikan pengelolaan keuangan Negara harus terus ditingkatkan. Sebanyak 287 entitas berhak atas penghargaan

tersebut, yang meliputi 62 Kementerian Lembaga, 26 Pemprov, 149 Pemkab, dan 50 Pemkot.

Rakernas yang digelar Kemenkeu tersebut mengambil tema implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual era baru akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Indonesia. Dengan tema tersebut, menurut Bambang Brojonegoro, sebagai upaya bersama untuk meningkatkan komitmen dan menumbuhkan sinergi para pengelola keuangan negara, yang baik, transparan, dan akuntabel melalui implementasi dan pelaporan keuangan berbasis akrual.

Ditambahkan, penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan sehingga menjadi alat pertanggungjawaban yang lebih baik, sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. "Hal ini merupakan modal yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah, terutama dalam era perekonomian yang semakin global saat ini," katanya.

Sementara Inspektur pada Inspektorat Jembrana, Koriani, menyebutkan, penerapan akuntansi berbasis akrual juga menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif. Tidak hanya sekedar informasi kas, sehingga informasi tersebut dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang lebih berkualitas. Koriani menambahkan, selain penyerahan penghargaan, dalam kesempatan itu juga dilaksanakan sidang pleno untuk membahas implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual. @od

Edisi : Senin, 5 Oktober 2015

Hal : 7